

Womenomics and Japan's Domestic Politics: The Transformation of Women Roles in the Shinzo Abe Administration

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2022, Vol. 12, No. 2: 219-243
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2022

Nathania Yunita Dharma*

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Triesanto Romulo Simanjuntak

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Putri Hergianasari

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Abstract

The issue of gender inequality is one of the big problems that Japan is facing nowadays. In the annual survey of the Women Economic Forum, Japan often occupies the lowest position in the indicators of women's participation in politics. This issue became one of Shinzo Abe's priorities when he was elected Prime Minister in 2012. Through a major policy during his administration known as Abenomics, Shinzo Abe introduced Womenomics as a gender-based policy strategy to increase women's participation in the workforce, including in politics. Womenomics was developed into several policies that are expected to provide a sense of security for women to be involved in politics so that women's participation rates were expected to increase. This article examines the implementation of Womenomics on women's participation in Japanese domestic politics from 2013 to 2020. It employs the qualitative approach and uses liberal feminism theory as its analytical framework. The data used in this study were secondarily obtained from various sources of books and publications by the Japanese government.

Key Words

Womenomics, women, Shinzo Abe, The Fourth Basic Plan for Gender Equality, domestic politics

*Penulis untuk korespondensi:

Nathania Yunita Dharma

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: nathaniayunitaa@gmail.com

Pendahuluan

Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling maju di kawasan Asia. Namun, kemajuan Jepang sebagai sebuah negara pada kenyataannya tidak disertai dengan budaya kerja yang mendukung terutama bagi kelompok perempuan. Budaya kerja negara Jepang dianggap diskriminatif dan tidak mendukung terhadap kelompok perempuan (Nemoto 2016:2). Ketimpangan dan diskriminasi berbasis gender menjadi persoalan yang sering terjadi di Jepang.

Ketimpangan dan diskriminasi berbasis gender bukanlah masalah baru di Jepang. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh budaya Jepang yang disebut *Ryosai Kenbo* (良妻賢母) yang sudah ada sejak Periode Meiji (Chikako 2003:86). *Ryosai Kenbo* secara harfiah dapat diartikan sebagai istri yang baik dan ibu yang bijak (*good wife, wise mother*). Hal ini merujuk pada sebuah ideologi yang merasionalisasi pembagian kerja berdasarkan gender, di mana laki-laki diasosiasikan dengan pekerjaan di sektor publik dan perempuan diasosiasikan dengan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak (Sakamoto 2014:159). Pada akhirnya, budaya *Ryosai Kenbo* membentuk pemahaman terhadap orang Jepang bahwa terdapat perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan sekaligus perbedaan dalam pembuatan kebijakan pendidikan, kesejahteraan sosial, pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan (Chikako 2003:86).

Rendahnya angka kesetaraan gender di Jepang dapat terlihat melalui laporan tahunan World Economic Forum, yakni Global Gender Gap Index, sebuah laporan tahunan yang rutin diterbitkan oleh World Economic Forum untuk mengukur ketimpangan berbasis gender di berbagai negara di seluruh dunia. World Economic Forum menggunakan empat indikator untuk mengukur ketimpangan berbasis gender, yakni partisipasi dan kesempatan dalam ekonomi (*economic participation and opportunity*), kesempatan untuk memperoleh pendidikan (*educational attainment*), akses terhadap kesehatan dan aspek penunjang kelangsungan hidup (*health and survival*), dan pemberdayaan politik (*political empowerment*) (WEF 2020:5). Global Gender Gap Index mencatat pada tahun 2012 partisipasi perempuan Jepang dalam politik berada di angka yang sangat rendah dengan total poin sebesar 0.0530¹ dan berada di urutan ke 120 dari total 133 negara (WEF 2012:11).

Partisipasi perempuan dalam politik di negara Jepang berada di bawah angka rata-rata partisipasi perempuan dalam politik di negara lain. Berdasarkan hasil publikasi Inter-Parliament Union (IPU) di tahun 2012, Jepang menempati posisi ke 106 dengan 52 kursi yang terisi oleh

perempuan dari total kuota 480 kursi di parlemen (UN Women 2012). Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik juga dapat terlihat dari minimnya perempuan yang menempati posisi setingkat menteri di Jepang. Begitupun dengan posisi sebagai gubernur atau walikota, di mana hanya 1.5% perempuan yang berhasil menduduki posisi tersebut (Emmott 2020:120).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik domestik Jepang disebabkan oleh ketidakramahan budaya kerja negara Jepang terhadap perempuan. Dalam budaya kerja Jepang, kelompok perempuan cenderung menjadi masyarakat kelas dua yang berada di bawah laki-laki. Adanya segregasi dan diskriminasi terhadap kelompok perempuan yang menganggap bahwa sudah seharusnya perempuan berfokus pada tugasnya secara tradisional, yakni mengurus rumah dan anak di rumah. Akibatnya, produktivitas perempuan dalam dunia kerja, baik dalam ekonomi maupun politik di Jepang menjadi sangat rendah dan Jepang dianggap sebagai negara yang tidak ramah terhadap perempuan.

Rendahnya produktivitas perempuan Jepang dalam sektor publik dan privat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi negara Jepang secara umum. Kathy Matsui, sebagai salah satu pencetus *Womenomics*, menganggap bahwa rendahnya produktivitas perempuan Jepang menyebabkan fenomena *M-curve*. Fenomena *M-curve* mengacu pada rendahnya partisipasi perempuan yang berada di usia produktif, di mana sebagian besar perempuan yang berada di usia 30-44 tahun yang dianggap sebagai usia produktif memilih untuk berhenti bekerja dan memilih untuk mengurus rumah tangga serta membesarkan anak (Matsui 2007:18). Dalam publikasinya yang berjudul *Womenomics: Japan's Hidden Asset*, Matsui menyebut bahwa terdapat lima siklus yang umumnya terjadi pada perempuan Jepang terutama di usia produktif, yakni lulus dari sekolah menengah atas atau bangku kuliah di usia rata-rata 18-22 tahun, menikah di usia 25-29 tahun, hamil lalu memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya untuk mengurus anak dan rumah tangga di usia 30-39 tahun, dan setelah anak dianggap sudah bisa mandiri, ibu akan melanjutkan kerja sampai dengan usia 45 tahun (Matsui 2007:18).

Siklus yang terus berulang membuat produktivitas perempuan Jepang dalam ranah privat dan publik menjadi sangat terbatas. Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang terpilih di tahun 2012 berupaya untuk memaksimalkan partisipasi perempuan dalam segala bidang sekaligus meningkatkan kesetaraan gender bagi kelompok perempuan di Jepang. Shinzo Abe menerapkan kebijakan *Womenomics* sebagai salah satu solusi

untuk menciptakan kesetaraan gender bagi perempuan, terutama kesetaraan dalam peluang kerja bagi kelompok perempuan. *Womenomics* merupakan bagian dari serangkaian kebijakan besar pemerintahan Shinzo Abe yang dikenal sebagai *Abenomics*². Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahannya, Shinzo Abe mulai melihat kelompok perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam keberlanjutan di Jepang.

Womenomics pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah kebijakan pada awal masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2013. Istilah *Womenomics* pertama kali diperkenalkan melalui Sidang Umum PBB yang ke-63 pada tanggal 26 September 2013 (Prime Minister of Japan and His Cabinet 2013). Dalam Sidang Umum tersebut, Shinzo Abe memperkenalkan *Womenomics* sebagai sebuah strategi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial politik. Abe menekankan *Womenomics* sebagai langkah baru pemerintah Jepang dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi perempuan serta meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan aktif dalam masyarakat (Prime Minister of Japan and His Cabinet 2013).

Artikel ini akan berfokus pada implementasi *Womenomics* terhadap partisipasi perempuan dalam politik domestik Jepang melalui berbagai kebijakan sebagai bentuk transformasi Jepang menuju negara ramah gender. Ia akan membahas *Womenomics* sebagai salah satu strategi era pemerintahan Shinzo Abe dalam meningkatkan partisipasi perempuan sekaligus meningkatkan kesetaraan gender di Jepang. Rentang waktu studi ini dibatasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2013 dipilih karena tahun tersebut menjadi tahun pertama pelaksanaan kebijakan *Womenomics* di Jepang, sedangkan tahun 2020 dipilih karena tahun tersebut menjadi tahun terakhir masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian beserta analisisnya dijabarkan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif dipilih karena sesuai dengan tema utama dalam penelitian yang membahas terkait dengan *Womenomics* sebagai strategi kebijakan era pemerintahan Shinzo Abe dalam mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Jepang.

Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan dan analisis. Berbagai data dikumpulkan dari sumber-sumber kredibel dan masih berkaitan dengan topik kajian. Studi literatur atau studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data penelitian yang

meliputi buku, artikel jurnal dengan topik yang relevan, dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang melalui *website* untuk menunjang penelitian.

Teori Feminisme Liberal Sebagai Kerangka Analisis

Teori feminisme liberal merupakan salah satu aliran dalam teori feminisme. Pemikiran liberal sering diidentifikasi sebagai pemikiran rasional seseorang. Kelompok liberal klasik beranggapan bahwa pentingnya intervensi negara dalam menjamin kebebasan individu (Tong 2009:12). Walaupun begitu, kelompok liberal menolak adanya intervensi negara dalam pasar bebas, tetapi mendukung intervensi negara dalam menciptakan persamaan kesempatan bagi individu di dalamnya. Kelompok liberal menekankan pada kesamaan hak bagi individu.

Dalam perkembangannya, teori feminisme banyak mengalami perubahan. Tong (2009:13) membagi perkembangan teori feminisme ke dalam tiga periode besar, yakni abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan tujuan kelompok feminis liberal di setiap periodenya. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan feminisme liberal, yaitu Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Harriet Taylor, dan Betty Friedan.

Perkembangan feminisme di abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wolstonecraft pada abad ke-18, di mana feminisme liberal di era ini menekankan pada persamaan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan. John Stuart Mill dan Harriet Taylor sebagai tokoh yang berpengaruh pada perkembangan kelompok feminis di era ini menekankan pada kesamaan hak yang diterima oleh perempuan maupun laki-laki. Menurut Mill, kebahagiaan dapat tercapai apabila seseorang diperbolehkan untuk mengejar keinginannya asalkan keinginan tersebut tidak merugikan atau tidak menghalangi orang lain. Hal ini yang kemudian berhubungan dengan konsep kesetaraan gender menurut Mill, di mana menurutnya kesetaraan gender hanya bisa dicapai ketika ada pemberian hak politik, peluang ekonomi, dan pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan (Tong 2019:16).

Secara sederhana, teori feminisme liberal berfokus pada pembebasan perempuan dari peran gender yang menindas (Tong 2019:34). Peran gender yang ada pada saat ini seolah-olah menempatkan perempuan jauh di bawah laki-laki. Hal ini yang kemudian menjadi kritik utama kelompok pendukung feminisme liberal karena menurut mereka diskriminasi gender masih terjadi. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh kelompok ini adalah

adanya jaminan kesetaraan hak, baik hak sosial dan maupun hak lainnya, dan adanya kesamaan kesempatan bagi kelompok perempuan dan laki-laki.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada teori feminisme liberal menurut John Stuart Mill dan Harriet Taylor. Mill dalam bukunya yang berjudul *The Subjection of Women* berpendapat bahwa sudah seharusnya perempuan diberikan kesempatan yang sama, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan sama seperti yang diterima oleh laki-laki. Argumen ini diperkuat dengan argumen Harriet Taylor yang menyebutkan bahwa feminisme liberal tidak berusaha untuk menentang masyarakat dengan melepas peran naluriah perempuan maupun mempertanyakan moralitas, tetapi yang diinginkan oleh kelompok perempuan adalah adanya pemisahan terhadap apa yang diinginkan oleh kelompok perempuan dan apa yang menjadi peran naluriahnya (*separated spheres*) (Bryson 2003:43). Apa yang diinginkan oleh kelompok perempuan dalam teori feminisme liberal menurut Mill dan Taylor adalah pemberian kesempatan yang sama, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan hak politik tetapi dengan adanya pemisahan antara apa yang mereka inginkan yang dalam hal ini mengacu pada kesempatan yang sama dengan laki-laki dan peran naluriahnya.

Teori feminisme liberal menurut Mill dan Taylor dipilih karena dianggap relevan dengan kajian ini. Teori ini berfokus pada pembebasan kelompok perempuan dari peran gender yang menindas serta pemberian kesempatan yang sama seperti yang diterima oleh laki-laki kepada perempuan. Dalam hal ini, kebijakan *Womenomics* hadir sebagai salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Jepang di era pemerintahan Shinzo Abe untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan Jepang, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial politik. Kebijakan *Womenomics* menjadi salah satu langkah pemerintah Jepang untuk menciptakan kesetaraan gender bagi kelompok perempuan Jepang.

Restorasi Meiji, Pengaruh Konfusianisme dan Represi atas Hak Politik Perempuan

Konfusianisme adalah sebuah kesatuan tradisi yang terdiri atas gabungan cara berpikir, menulis, berperilaku, dan praktik (Paramore 2016:4), yang menjadi salah satu acuan dalam membentuk moralitas dan etika masyarakat Jepang. Konfusianisme tidak hanya dipandang sebagai sebuah ajaran filosofis semata, tetapi juga dipandang sebagai pembentuk moral dan etika sekaligus pembentuk struktur sosial (*social structures*) masyarakat Jepang. Masuknya ajaran Konfusianisme ke Jepang berpengaruh terhadap pembentukan identitas perempuan, terutama keterkaitan perempuan

dengan perannya dalam ranah domestik.

Konfusianisme dalam sejarah Jepang sangat berkaitan erat dengan paradigma keluarga patriarkis atau *patriarchal family paradigm* yang tertanam pada sistem birokrasi dan hukum yang diterapkan di China (Ko et al 2003:5). Sistem birokrasi dan hukum yang dianggap patriarkis dari China berkembang di Jepang pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-8. Paradigma keluarga patriarkis berpengaruh pada konstruksi peran berbasis gender, terutama dalam kehidupan politik dan bernegara. Salah satu contoh dari konstruksi peran berbasis gender akibat paradigma keluarga patriarkis adalah adanya syarat mutlak bagi pewaris takhta pada abad ke-8 sebagai pemimpin negara yang harus merupakan laki-laki dan terus dipraktekkan sampai dengan saat ini.

Menurut ajaran Konfusianisme, kepatuhan dan berbakti merupakan inti dasar dalam relasi manusia. Hal ini mengacu pada tiga ikatan (*sankō*)—ikatan penguasa dan menteri, ikatan ayah dan anak, dan hubungan suami dan istri— dan lima relasi (*gorin*)—bakti anak kepada ayah, kesetiaan menteri terhadap penguasa, harmonisasi suami dan istri, prioritas kakak dan adik, dan kepercayaan antar teman— yang ditekankan dalam ajaran Konfusianisme (Ko et al 2003:5). Kepatuhan dan bakti tidak hanya diterapkan dalam relasi domestik seperti keluarga, tetapi juga diterapkan pada ranah publik seperti dalam kehidupan bernegara. Pemimpin Jepang menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah dan rakyat sebagai seorang anak, sehingga rakyat diharuskan untuk membaktikan dirinya kepada pemimpin negara selaku ayah atau kepala keluarga.

Konsep kepatuhan dan bakti sebagaimana yang diterapkan dalam konsep dasar Konfusianisme menjadi salah satu landasan dasar bagi pemerintah Jepang pada periode Meiji untuk membentuk propaganda sebagai bagian dalam upaya restorasi atau perbaikan negara secara masif yang juga dikenal sebagai Restorasi Meiji. Secara umum, Restorasi Meiji merupakan sebuah upaya modernisasi Jepang yang mengacu pada modernisasi di Eropa dan Amerika dan ditandai dengan perubahan bentuk pemerintahan dari shogun ke kekaisaran.

Konfusianisme memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berlangsungnya Restorasi Meiji. Walaupun secara konsep besar Restorasi Meiji mengarah pada proses perubahan Jepang menuju era yang lebih modern, beberapa tokoh penting dalam Restorasi Meiji, seperti Yoshida Shoin, Sakuma Shozan, dan Yokoi Shonan, tetap menekankan upaya modernisasi pada nilai-nilai dasar yang telah dipraktikkan sejak era Tokugawa (Swale 2009:14). Salah satu nilai dasar tersebut adalah struktur

sosial yang mengatur masyarakat berdasarkan ikatannya. Oleh karenanya, semangat mendasar yang diterapkan dalam proses modernisasi Jepang adalah *Wakon Yosai*, yang dapat diartikan sebagai semangat Jepang dengan mengadopsi pembelajaran Barat (*Japanese Spirit, Western Learning*) (Swale 2009:14).

Adanya upaya modernisasi yang memiliki kecenderungan untuk “mengadopsi” beberapa kebiasaan Barat ikut berpengaruh terhadap peluang partisipasi perempuan dalam politik. Dapat dikatakan bahwa periode Meiji menjadi salah satu periode yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika keterlibatan perempuan dalam ranah publik, terutama dalam bidang politik. Berbagai aturan baru serta propaganda yang digunakan oleh pemerintah menyebabkan perempuan sulit untuk terlibat di dalamnya. Bahkan dalam era Restorasi Meiji, perempuan mengalami tekanan melalui berbagai peraturan yang disusun oleh pemerintah sehingga perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik.

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi sangat terbatas karena pemerintah Jepang menerbitkan sebuah propaganda yang dikenal sebagai *Ryosai Kenbo*, sebuah paham atau konsep yang membentuk gambaran perempuan ideal, di mana perempuan ideal digambarkan sebagai perempuan yang memilih untuk mengabdikan dirinya bagi keluarga sebagai ibu rumah tangga (Dalton 2015:23). Penggambaran konsep perempuan dan perannya sebagai ibu rumah tangga dipengaruhi oleh konsep perempuan kelas menengah di Amerika. Walaupun pada awalnya *Ryosai Kenbo* hanya ditujukan untuk memberikan tekanan pada perempuan dalam bidang pendidikan, pada akhirnya propaganda tersebut digunakan juga untuk memberikan tekanan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan, tanpa terkecuali.

Tekanan yang diberikan oleh pemerintah pada kelompok perempuan semakin diperkuat dengan diterbitkannya aturan hukum baru yang disusun guna membatasi pergerakan perempuan dalam politik. Salah satu aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Jepang untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik adalah *Law on Associations and Meetings (Shukai Oyobi Kessha Ho)* pada tahun 1890 (Nolte 1991:154). Dalam aturan tersebut, pemerintah Jepang melarang perempuan untuk menghadiri dan terlibat dalam berbagai aktivitas politik atau dengan kata lain, pemerintah Jepang pada saat itu mencabut segala hak politik perempuan. Aturan ini terus berlangsung selama 32 tahun sampai dengan tahun 1922. Walaupun begitu, pengucilan perempuan dari berbagai aktivitas politik masih terus berjalan hingga tahun 1945.

Politik Konservatif dan Representasi Perempuan dalam Politik

Partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap besar kecilnya representasi perempuan di dalam politik. Kehadiran partai politik dalam keberlanjutan politik di Jepang sangatlah penting mengingat para representatif di lembaga legislatif, yakni *House of Representatives* atau Majelis Tingkat Rendah (*Shugiin*) dan *House of Councillors* atau Majelis Tingkat Tinggi (*Sangiin*) memerlukan dukungan partai politik agar dapat memperoleh jabatan yang dituju. Terdapat beberapa partai politik besar di Jepang yang mencakup Liberal Democratic Party (LDP), New Komeito, Japanese Communist Party (JSP), dan Social Democratic Party (SDP).

Melekatnya sistem politik Jepang dengan politik konservatif tidak lepas dari pengaruh LDP sebagai salah satu partai besar di Jepang. Pengaruh besar LDP dapat dirasakan sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1955 sampai dengan saat ini. Keterkaitan antara LDP sebagai partai politik dengan Shinzo Abe telah berlangsung sejak lama. LDP menjadi partai politik pengusung Shinzo Abe dalam pencalonannya sebagai Perdana Menteri pada masa jabatannya yang pertama pada tahun 2006 dan masa jabatannya yang kedua di tahun 2012. Shinzo Abe diketahui pernah memegang jabatan tertinggi dalam LDP, yakni presiden partai selama 9 tahun yaitu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.

Sifat eksklusivitas yang dibawa oleh LDP sebagai sebuah partai politik menjadi salah satu penyebab representasi perempuan dalam politik menjadi sangat rendah. LDP seringkali menempatkan perempuan layaknya kelompok oposisi sehingga perempuan sulit untuk terpilih karena kurangnya dukungan partai dan aspek-aspek penunjang lainnya, seperti kebutuhan kampanye. Terdapat tiga aspek atau tiga *ban* yang dianggap sebagai aspek penunjang keberhasilan dalam kampanye namun tidak dimiliki oleh kelompok perempuan, yakni *kaban* (uang), *jiban* (organisasi atau koneksi), serta *kanban* (popularitas) (Dalton 2015:20). Ketiga aspek tersebut menjadi kekurangan perempuan dibandingkan laki-laki yang mencalonkan diri sebagai representasi.

Nilai dasar yang dibawa oleh Shinzo Abe dalam strategi kebijakan politiknya bertentangan dengan nilai yang dibawa oleh LDP sebagai partai politik pengusungnya. LDP dengan sifatnya yang eksklusif dan memiliki kecenderungan untuk tidak banyak melibatkan perempuan dalam aktivitas politiknya dihadapkan langsung dengan kebijakan politik Shinzo Abe yang mendukung lebih banyak partisipasi perempuan di bidang politik. Hadirnya kebijakan politik Shinzo Abe yang menggunakan isu gender sebagai bagian

dalam kebijakan besarnya menjadi salah satu tahap untuk melepaskan citra konservatif yang selama ini melekat pada sistem politik Jepang.

Sosok Shinzo Abe pada masa kepemimpinannya yang kedua sebagai Perdana Menteri Jepang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap peran perempuan dalam politik melalui berbagai kebijakan barunya. Iklim politik Jepang yang sangat konservatif dan cenderung tertutup bagi perempuan untuk terlibat di dalamnya menjadi salah satu tantangan besar Shinzo Abe untuk mewujudkan cita-cita besar pada masa kepemimpinannya yang kedua, yakni mendorong partisipasi perempuan secara maksimal di berbagai aspek, salah satunya politik. Melalui strategi kebijakannya yang dikenal sebagai *Womenomics*, Shinzo Abe berupaya untuk memaksimalkan peran perempuan di dalam politik melalui berbagai aturan dan Undang-Undang baru yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi untuk waktu yang lama.

***Womenomics* Sebagai Strategi Kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe**

Womenomics merupakan salah satu kebijakan politik Perdana Menteri Shinzo Abe pada masa pemerintahannya yang kedua sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012-2020. Kebijakan *Womenomics* merupakan implementasi dari kebijakan besar Perdana Menteri Shinzo Abe yang dikenal sebagai *Abenomics*. Kehadiran *Abenomics* sebagai sebuah kebijakan disebabkan oleh keadaan perekonomian Jepang yang stagnan selama 20 tahun dan dikenal sebagai “*Lost Decade*” akibat terjadinya fenomena *bubble economy* (Botman et al 2015:16). Shinzo Abe memfokuskan pemulihan ekonomi Jepang melalui tiga arah kebijakan, yang mencakup kebijakan moneter guna mengatasi deflasi, kebijakan fiskal yang fleksibel untuk menstimulasi perekonomian, dan reformasi struktur (Aramaki 2018:285).

Salah satu upaya Shinzo Abe dalam meningkatkan perekonomian Jepang adalah mendorong kelompok perempuan agar dapat terlibat aktif dalam perekonomian sebagai tenaga kerja. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi struktur yang ditekankan pada arah kebijakan ketiga *Abenomics*. Keterlibatan aktif perempuan dalam perekonomian, secara spesifik dalam partisipasinya sebagai tenaga kerja, menjadi akar dari terbentuknya kebijakan *Womenomics*. Melalui kebijakan *Womenomics*, pemerintah Jepang mendorong perempuan agar mampu terlibat aktif tanpa harus terbebani oleh konstruksi peran berbasis gender maupun hambatan lain yang dapat menghambat produktivitas perempuan.

Womenomics pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah strategi

pemulihan ekonomi Jepang oleh Kathy Matsui pada tahun 1999. Dalam argumennya, Kathy Matsui menjelaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian Jepang. Namun, permasalahan besar yang menjadi tantangan bagi Jepang adalah rendahnya partisipasi perempuan di usia produktif akibat keputusan perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena tidak mampu menyeimbangkan waktu bekerja dan mengurus rumah serta budaya kerja yang tidak ramah bagi perempuan sehingga mempersulit perempuan untuk terlibat di dalamnya. Karena itu, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang ramah bagi perempuan sehingga perempuan mampu terlibat sebagai tenaga kerja sekaligus meningkatkan perekonomian Jepang.

Strategi *Womenomics* kemudian diadopsi oleh Shinzo Abe dan diperkenalkan kepada masyarakat internasional sebagai sebuah kebijakan nasional Jepang lewat pidato yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-63 di tahun 2013. Dalam pidatonya, Abe menegaskan bahwa perempuan menjadi pilar penting dalam membangkitkan kembali perekonomian Jepang. Dalam pidato tersebut, ia berkomitmen untuk mengubah struktur domestik Jepang, secara spesifik pada lapangan kerja, menjadi lebih ramah terhadap perempuan sehingga mampu menciptakan situasi bagi perempuan untuk dapat bersinar (*a society in which women shine*). Kalimat *a society in which women shine* mengacu pada kondisi di mana perempuan mampu berpartisipasi secara aktif melalui perannya di masyarakat (Ministry of Foreign Affairs 2015:2).

Terbentuknya kebijakan *Womenomics* tidak lepas dari strategi reformasi struktur *Abenomics*, yakni *Japan Revitalization Strategy*. *Japan Revitalization Strategy* merupakan strategi kebijakan guna mendukung reformasi struktur yang berfokus pada pembaharuan sektor-sektor yang dianggap krusial dan bermanfaat bagi negara guna percepatan perbaikan ekonomi Jepang. Terdapat 10 kunci perubahan dalam *Japan Revitalization Strategy* di mana poin ke-6 menekankan pada peningkatan partisipasi perempuan di lapangan kerja melalui berbagai perubahan dalam sistem kerja serta penambahan fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak (Kantei 2014:8). *Japan Revitalization Strategy* menjadi dasar dalam pembuatan berbagai kebijakan yang mendukung peran perempuan sebagai tenaga kerja, termasuk kebijakan *Womenomics*.

Walaupun Jepang menjamin kesetaraan gender melalui berbagai Undang-Undang kesetaraan gender sejak waktu yang lama, hal tersebut

masih belum cukup untuk meningkatkan angka kesetaraan gender di negara tersebut. Karena itu, *Basic Plan on Gender Equality* dibutuhkan sebagai bentuk arahan atau *guideline* pencapaian kesetaraan gender setiap lima tahun sekali. Tujuan terbentuknya *Basic Plan on Gender Equality* adalah untuk memastikan bahwa Jepang memiliki *progress* yang terus meningkat sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita negara, yaitu menciptakan masyarakat dengan kesetaraan gender. Keterlibatan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender menjadi bentuk implementasi dari peran aktif pemerintah Jepang di tingkat negara maupun daerah dalam mengupayakan perwujudan masyarakat dengan kesetaraan gender.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam lapangan kerja. Karena itu, melalui kebijakan *Womenomics* pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan perlindungan hukum melalui berbagai aturan baru sehingga perempuan dapat berperan aktif di masyarakat. Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru disusun guna memastikan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi secara maksimal. Terbentuknya kebijakan dan Undang-Undang baru menjadi bagian dalam *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*.

The Fourth Basic Plan for Gender Equality* Sebagai Strategi Kebijakan *Womenomics

The Fourth Basic Plan for Gender Equality merupakan sebuah strategi yang disusun dan disetujui oleh kabinet selaku lembaga eksekutif pada tahun 2015 guna mendukung tercapainya kesetaraan gender di Jepang melalui berbagai kebijakan ramah gender. Terbentuknya *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* juga berkaitan dengan komitmen Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menempatkan isu kesetaraan bagi perempuan sebagai prioritas utama dalam masa kepemimpinannya yang kedua (*The Head of the Delegation of Japan 2016:3*). Pemerintah Jepang melalui *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* tidak hanya berupaya untuk menciptakan masyarakat dengan kesetaraan gender atau *gender-equal society* sebagaimana tercantum dalam *Basic Act for Gender-Equal Society* sebagai dasar Undang-Undang kesetaraan gender, tapi secara spesifik berupaya untuk menciptakan tempat yang aman bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya.

Kehadiran *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* menekankan

pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat di Jepang. Baik pemerintah maupun masyarakat Jepang turut serta dalam perumusan *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*. Peran masyarakat dalam pembentukan *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* terletak pada opini serta audiensi publik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan agar dapat menyusun *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* sesuai dengan prioritas dan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam proses pembentukannya, terdapat empat karakteristik dasar *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* yang membedakannya dari *Basic Plan on Gender Equality*. Empat karakteristik dasar tersebut mencakup laki-laki dan perempuan mampu menunjukkan kemampuannya serta memiliki kewajiban untuk menghormati pilihannya sendiri, laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi, adanya keseimbangan kerja bagi perempuan maupun laki-laki melalui reformasi gaya kerja yang berorientasi pada laki-laki, serta menempatkan isu kesetaraan gender sebagai prioritas sehingga masyarakat Jepang dapat diakui secara internasional dalam hal kesetaraan gender (Government of Japan 2015:2).

Sejalan dengan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara masif, Shinzo Abe menetapkan target 30% bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan baik dalam sektor publik maupun swasta yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Komitmen ini sejalan dengan tujuan awal kebijakan *Womenomics*, yakni menciptakan lingkungan yang nyaman bagi perempuan sehingga perempuan dapat berpartisipasi melalui perannya di masyarakat. Pemerintah Jepang menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan ramah gender tidak dapat berlangsung secara maksimal tanpa adanya dukungan serta peran maksimal dari berbagai pihak. Karena itu, pelaksanaan kebijakan *Womenomics* menekankan pada peran negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat dengan kesetaraan gender (*Gender Equal-Society*).

The Fourth Basic Plan for Gender Equality dan kebijakan *Womenomics* merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* di tahun 2015 didasari oleh kebijakan *Womenomics* yang terbentuk pada tahun 2013. *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* berfokus pada perbaikan kesetaraan gender di Jepang melalui berbagai kebijakan serta aturan baru. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dari terbentuknya kebijakan *Womenomics* yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi perempuan di berbagai bidang agar perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki di

ranah publik.

The Fourth Basic Plan for Gender Equality terbagi atas empat jenis arah kebijakan, salah satunya secara khusus membahas terkait dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam segala bidang di masyarakat. Kebijakan untuk mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan dalam segala bidang kemudian terbagi lagi ke dalam lima target indikator pencapaian yang mencakup reformasi sistem kerja yang berorientasi pada laki-laki sebagai bentuk pemberdayaan perempuan, ekspansi partisipasi perempuan dalam proses perumusan serta pembuatan kebijakan, kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan sekaligus memastikan adanya *work-life balance*, promosi kesetaraan gender dalam konteks regional, rural, dan lingkungan, serta kesetaraan gender dalam bidang sains, teknologi, serta akademis (Gender Equality Bureau Cabinet Office 2015:5).

Namun, pembahasan ini akan berfokus pada tiga arah kebijakan, yakni reformasi sistem kerja yang berorientasi pada laki-laki, ekspansi partisipasi perempuan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan, dan memastikan adanya kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan sekaligus memastikan adanya *work-life balance* melalui Undang-Undang maupun aturan baru yang dibentuk guna mempercepat pencapaian ketiga arah kebijakan. Kebijakan atau aturan baru yang dibentuk di bawah *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* diuraikan di bawah ini.

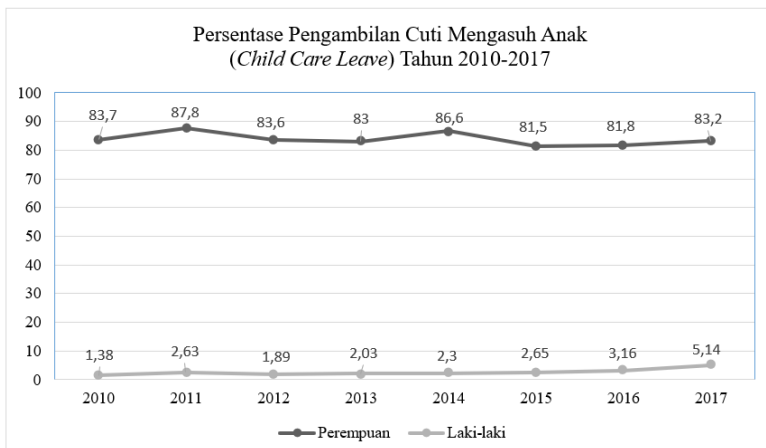
The Intensive Policy to Accelerate the Empowerment of Women merupakan salah satu bentuk *output* dari *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*. Kebijakan ini pertama kali dirumuskan pada tahun 2015 dan mulai diimplementasikan dua tahun kemudian, yakni di tahun 2017. Terbentuknya kebijakan ini menjadi sangat penting karena kebijakan tersebut diformulasikan dengan menempatkan perspektif pemberdayaan perempuan ke dalam alokasi anggaran untuk pertama kalinya (Gender Equality Bureau Cabinet Office 2018:29). Oleh sebab itu, kebijakan ini berfokus pada perbaikan berbagai masalah yang dapat menghambat peran perempuan di ranah publik.

The Intensive Policy to Accelerate the Empowerment of Women dan Womenomics merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran kebijakan ini tidak dapat terlepas dari tujuan awal terbentuknya *Womenomics*, yaitu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk terlibat di ranah publik yang dalam hal ini mengacu pada lapangan kerja tanpa harus terbebani oleh peran yang mengikat di ranah domestik.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe kemudian menempatkan beberapa prioritas tujuan pencapaian yang ingin dicapai melalui terbentuknya *The Intensive Policy to Accelerate the Empowerment of Women*. Target pencapaian tersebut mencakup reformasi gaya bekerja untuk membantu perempuan agar dapat berkembang, mendorong laki-laki untuk terlibat aktif dalam ranah domestik, serta memperluas kesempatan perempuan untuk ikut serta di berbagai bidang melalui pelatihan penunjang (Gender Equality Bureau Cabinet Office 2018:29).

Penekanan pada peran aktif laki-laki dalam ranah domestik menjadi prioritas utama dalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik. Hal ini berkaitan dengan rendahnya partisipasi laki-laki di dalam ranah domestik, salah satunya dalam mengurus anak. Data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesetaraan Gender Jepang di tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam mengurus anak masih sangat rendah. Persentase pengambilan cuti mengasuh anak (*child care leave*) perempuan dan laki-laki di Jepang selama tahun 2010 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Data Akumulasi Pengambilan Cuti Perempuan dan Laki-laki Tahun 2010-2017



Sumber: Gender Equality Bureau Cabinet Office 2020:11

Berdasarkan Grafik 1 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persentase rata-rata yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mengambil cuti mengasuh anak selama tahun 2010 sampai 2017. Angka ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang mengapa hanya sedikit laki-laki yang mengambil cuti mengasuh anak dan ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa laki-laki Jepang memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan negara-negara maju lainnya dalam hal *parental leave*. Dalam data OECD di tahun 2017, Jepang menempati posisi kedua sebagai negara dengan akumulasi waktu cuti berbayar untuk mengasuh anak (*paid parental leave*) terpanjang di dunia, yakni 52 minggu. Namun sayangnya, kesempatan tersebut tidak bisa benar-benar digunakan dengan baik mengingat hanya sedikit laki-laki yang menggunakan kesempatan tersebut selama rentang tahun 2010 sampai 2017.

Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field

Representasi perempuan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan sangat penting mengingat adanya perbedaan perspektif serta kepentingan yang dibawa oleh perempuan. Representasi perempuan merupakan sebuah keharusan karena perempuan memiliki kecenderungan untuk melihat agenda politik berdasarkan sudut pandangnya, baik sebagai istri, ibu, maupun peran-peran lainnya yang mungkin tidak dapat tersampaikan secara maksimal oleh laki-laki. Namun, faktanya, keterwakilan perempuan dalam konteks pembuat kebijakan masih sangat rendah.

Tabel 1. Data Representasi Perempuan dalam Politik Domestik Jepang³

No.	Posisi	2014	2015	2016	Target Tahun 2020
1.	<i>Shugiin</i> (House of Representatives)	9.5%	9.5%	9.3%	
2.	<i>Sangiin</i> (House of Councillors)	15.7%	15.7%	20.7%	
3.	Kementerian	21.1%	4.45%*	4.4%*	30%
4.	Pejabat setingkat daerah (walikota dan gubernur prefektur)	3.85%	2.3%	3.03%	
5.	Anggota majelis tingkat daerah (prefektur, kota, distrik, dan desa)	10.1%	10.5%	11.26%	

Sumber: Data Publikasi *Gender Equality Bureau Cabinet Office*, edited

Sebagaimana pada Tabel 1, Biro Kesetaraan Gender Jepang menunjukkan bahwa Jepang masih tertinggal jauh untuk mencapai target 30% dalam hal representasi perempuan dalam politik sebagaimana yang tercantum dalam target kebijakan *Womenomics* serta *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik membuat Perdana Menteri Shinzo Abe memfokuskan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagai salah satu target dalam kebijakan *Womenomics* dan *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*. Upaya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dapat terlihat dengan terciptanya sebuah Undang-Undang baru yang secara khusus membahas tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Undang-Undang ini dikenal dengan nama *Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field* atau Undang-Undang dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender di Bidang Politik.

Secara umum, ekspansi partisipasi perempuan dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan mengacu pada dukungan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan, secara khusus dalam politik. Upaya ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang baru yang lahir di bawah pelaksanaan *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* di tahun 2018. Undang-Undang baru yang dikenal sebagai *Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field* secara umum memberikan jaminan kepada perempuan maupun laki-laki bahwa keduanya memiliki hak yang sama di dalam politik dan negara serta pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengupayakan hal tersebut.

Kehadiran *Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field* sebagai Undang-Undang baru dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam bidang politik menjadi salah satu upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik domestik Jepang. Tujuan dari terbentuknya Undang-Undang ini adalah untuk memberikan dukungan kepada perempuan agar dapat terlibat secara aktif dan bebas dalam politik. Hal ini sejalan dengan rencana Perdana Menteri Shinzo Abe dalam kebijakan *Womenomics* yang menargetkan angka 30% bagi partisipasi perempuan dalam bidang politik di tahun 2020.

Pemerintah Jepang menyadari bahwa perempuan dan laki-laki berhak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Pemerintah Jepang membentuk sebuah Undang-Undang di bawah pelaksanaan *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* untuk memastikan bahwa hak perempuan dalam politik benar-benar terjamin. Pemerintah Jepang menciptakan Undang-Undang yang diberi nama *Act on Promotion*

of Gender Equality in the Political Field pada tahun 2018 sebagai langkah untuk memberikan dukungan kepada perempuan agar dapat terlibat dalam politik secara maksimal.

Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace

Pada tahun 2016, National Diet sebagai lembaga legislatif Jepang menerbitkan sebuah Undang-Undang baru di bawah *The Fourth Basic Plan for Gender Equality* yang dikenal sebagai *Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*. Tujuan dasar dari terbentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi kelompok perempuan agar dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja dengan sistem yang transparan dan terbuka. Undang-Undang ini secara khusus mempromosikan partisipasi perempuan dalam lapangan kerja melalui berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan, seperti keseimbangan waktu bekerja dan juga peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam lapangan kerja (Gender Equality Bureau Cabinet Office 2016). Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah Jepang berupaya untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan yang dianggap patriarkis dan mempersulit kelompok perempuan untuk terlibat di dalamnya melalui berbagai inisiatif baru.

Salah satu bentuk inisiatif sekaligus implementasi dari *Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace* yang dihasilkan oleh Pemerintah Jepang untuk mendukung partisipasi perempuan dalam lapangan kerja adalah dengan diciptakannya Sertifikasi *Eruboshi*. Sertifikasi *Eruboshi* merupakan bentuk sertifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk mempromosikan percepatan dalam upaya peningkatan dan perluasan partisipasi perempuan di lapangan kerja sekaligus untuk menempatkan lebih banyak perempuan di level manajerial (Cabinet Office, Government of Japan 2017:9).

Selain menargetkan perusahaan swasta dalam implementasinya, Pemerintah Jepang secara khusus menargetkan lembaga pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal untuk ikut serta di dalamnya. Implementasi Undang-Undang di dalam politik dapat terlihat dari adanya penetapan target proporsi pegawai negeri melalui proses rekrutmen yang transparan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menempati posisi pegawai negeri. Indikator

yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi Undang-Undang tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Indikator pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan di Tingkat Nasional

No.	Indikator	Keterangan
1.	Angka rekrutmen tenaga kerja perempuan baru	Ditujukan bagi pekerja paruh waktu
2.	Jumlah tenaga kerja perempuan yang mengambil cuti untuk mengurus anak (<i>childcare leave</i>)	
3.	Frekuensi kerja jarak jauh (<i>telecommuting</i>)	Pengurangan waktu bekerja yang panjang guna mendukung <i>Work-Life Balance</i>
4.	Tingkat implementasi hari tanpa lembur	
5.	Proporsi cuti tahunan/harian yang diambil oleh pekerja perempuan	
6.	Jumlah tenaga kerja laki-laki yang mengambil cuti melahirkan (membantu istri) maupun cuti untuk mengurus bayi	
7.	Jumlah tenaga kerja yang mengambil cuti untuk mengurus anak	-
8.	Jumlah tenaga kerja perempuan (proporsi tenaga kerja perempuan sebagai pekerja tetap)	
9.	Proporsi ASN perempuan yang lulus melalui ujian rekrutmen	

Sumber: *White Paper on Gender Equality 2017*
(Cabinet Office, Government of Japan 2017:6)

Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target melalui publikasi informasi yang terbuka bagi publik. Untuk sampai pada tahap akhir, yaitu publikasi pencapaian dan informasi terkait, lembaga-lembaga negara perlu melalui tahap koordinasi dalam beberapa indikator seperti proporsi tenaga kerja perempuan, jam bekerja, jumlah perkerja laki-laki dan atau perempuan yang mengambil cuti untuk mengurus anak, dan lain sebagainya. Koordinasi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara bersama dengan empat lembaga negara lain

yang bertanggung jawab, yakni Sekretaris Kabinet, Kabinet, Badan Urusan Konsumen, serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan (Cabinet Office, Government of Japan 2017:5).

Kebijakan *Womenomics* dalam Perspektif Feminisme Liberal

Kebijakan *Womenomics* berkaitan erat dengan cara pandang teori Feminisme liberal tentang partisipasi perempuan di ranah publik. Feminisme liberal mendukung adanya persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan agar dapat terlibat dalam pekerjaan yang sering diidentifikasi sebagai ranah laki-laki. Paham feminisme liberal tidak berupaya untuk menentang peran naluriah perempuan, tapi memberikan peluang bagi perempuan untuk memilih apa yang diinginkan.

Dalam kebijakan *Womenomics*, Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Shinzo Abe melalui berbagai kebijakan politiknya berupaya untuk memberikan dukungan terhadap partisipasi perempuan melalui berbagai aturan baru yang dianggap dapat meringankan beban ganda sekaligus dilema yang dihadapi oleh perempuan dalam perannya sebagai pekerja dan atau ibu. Hadirnya *Womenomics* juga memberikan ruang bagi perempuan agar dapat menentukan sendiri apa yang diinginkannya, dalam hal ini terlibat dalam politik, tetapi tetap mampu menjalankan peran naluriahnya sebagai seorang istri dan ibu di rumah.

Melalui kebijakan *Womenomics*, Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja ramah gender melalui pembuatan berbagai kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam lingkungan kerja, secara khusus dalam politik. Dibentuknya *The Fourth Basic Act Plan*, secara khusus *Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace* dan *Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field* menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah Jepang untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi perempuan.

Bagi kelompok feminis liberal, persamaan kesempatan bagi individu dapat terjadi apabila ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Dalam hal ini, pemerintah Jepang berupaya untuk turut serta dalam menciptakan persamaan kesempatan bagi individu, secara khusus dalam lapangan pekerjaan. Mengacu *Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengakses lapangan pekerjaan. Begitu juga dalam bidang politik, dalam Pasal 1 *Act on Promotion of Gender Equality in the*

Political Field tertulis bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses dalam politik sehingga hadirnya kebijakan *Womenomics* ingin menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam politik.

Kesimpulan

Penempatan isu gender sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan politik merupakan langkah besar yang diambil oleh Shinzo Abe di masa kepemimpinannya yang kedua sebagai Perdana Menteri Jepang. Peningkatan peran perempuan di ranah publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan politik Shinzo Abe merupakan sebuah inovasi baru mengingat keterlibatan perempuan dalam ranah publik seringkali dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dibawa secara turun temurun. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan baru, termasuk rendahnya partisipasi perempuan di usia produktif sebagai tenaga kerja.

Kehadiran *Womenomics* sebagai salah satu strategi kebijakan berbasis gender yang dihadirkan oleh Shinzo Abe merupakan bagian dari upaya pemulihan sekaligus sebagai jawaban atas berbagai masalah sosial maupun ekonomi yang dihadapi Jepang saat ini. *Womenomics* secara umum menargetkan lebih banyak perempuan di usia produktif untuk terlibat aktif sebagai tenaga kerja. Tidak hanya menargetkan perempuan sebagai tenaga kerja semata, tetapi secara spesifik menempatkan perempuan pada posisi atau jabatan yang sering diasosiasikan dengan laki-laki.

Implementasi *Womenomics* difokuskan pada pembuatan berbagai kebijakan baru di bawah *The Fourth Basic Plan of Gender Equality* sebagai rancangan dasar rutin per lima tahunan yang disusun oleh Pemerintah Jepang untuk menciptakan masyarakat Jepang dengan kesetaraan gender. Strategi kebijakan *Womenomics* ini berfokus pada pembuatan berbagai aturan serta Undang Undang baru yang dianggap menjadi pilar sekaligus menjadi payung hukum bagi perempuan dan partisipasinya dalam ranah publik. Terdapat tiga aturan maupun kebijakan baru yang berhasil dibuat di bawah *The Fourth Basic Plan for Gender Equality*, yakni *The Intensive Policy to Accelerate the Empowerment of Women*, *Act on Promotion of Gender Equality in the Political Field*, serta *Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*.

Langkah Jepang untuk menciptakan kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan masih sangat panjang. Hambatan-hambatan berupa konsep

tradisional yang masih dipegang teguh hingga saat ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi untuk bisa mencapai kesetaraan gender. Kehadiran *Womenomics* sebagai strategi kebijakan di masa pemerintahan Shinzo Abe yang kedua merupakan sebuah langkah besar yang diambil oleh Pemerintah Jepang untuk mencapai masyarakat dengan kesetaraan gender. Pemerintah Jepang memiliki tugas besar untuk terus berinovasi serta bekerja untuk menciptakan keadilan bagi perempuan, terutama di dalam lapangan kerja dan secara khusus dalam politik.

Catatan Akhir

¹Poin maksimal yang dapat diterima oleh satu negara dalam satu bidang indikator adalah 1. Semakin dekat angka yang diperoleh dengan poin maksimal, semakin tinggi angka kesetaraan gender di negara tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil poin yang diperoleh suatu negara, semakin rendah angka kesetaraan gender di negara tersebut.

²*Abenomics* merupakan rangkaian kebijakan yang diterbitkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dan mulai dilaksanakan pada tahun 2012 sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Shinzo Abe di tahun 2020. *Abenomics* berfokus pada upaya perbaikan ekonomi Jepang melalui 3 arah target, yakni kebijakan moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktur (termasuk *Womenomics* di dalamnya).

³Terdapat perubahan formulasi pada data publikasi Biro Kesetaraan Gender di tahun 2016 dan 2017 yang menyebabkan adanya perbedaan data dan perhitungan.

Referensi

- Aramaki, Kenji. 2018. *Japan's Long Stagnation, Deflation, and Abenomics: Mechanisms and Lessons*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Bernstein, Gail Lee. 1991. *Recreating Japanese Women, 1600-1945*. California: University of California Press.
- Botman, Dennis, et. al (Eds.). 2015. *Can Abenomics Succeed? Overcoming the Legacy of Japan's Lost Decades*. Washington, D.C: International Monetary Fund.
- Bryson, Valerie. (2003). *Feminist Political Theory: An Introduction (Second Edition)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cabinet Office, Government of Japan. 2017. "Utilizing the Act to Promote Women's Participation to Accelerate and Expand the Advancement of Women". *White Paper on Gender Equality 2017*.
- Dalton, Emma. 2015. *Women and Politics in Contemporary Japan*. New York: Routledge.
- Emmott, Bill. 2020. *Japan's Far More Female Future: Increasing Gender Equality and Reducing Workplace Insecurity Will Make Japan Stronger*. Oxford: Oxford University Press.

-
- Fennel, Shailaja dan Madeleine Arnot. 2008. *Gender Education and Equality in a Global Context : Conceptual Frameworks and Policy Perspectives*. New York : Routledge.
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2016. *Towards Accepting Diverse Work Styles and Lifestyles: From the "White Paper on Gender Equality 2016*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 22 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/whitepaper/pdf/ewp2016.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2015. *Gender Equality Policy in Japan*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 12 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_csw/pdf/beijing25_12.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2017. *The Intensive Policy to Accelerate the Empowerment of Women 2017 (Decided by the Headquarters for Creating a Society in which All Women Shine on 6 June 2017)*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 13 Januari, 2022.
(https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men18/pdf/2-4.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2016. *Policy and Decision-making*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 18 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men15/pdf/1-2.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2017. *Policy and Decision-making*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 18 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men16/pdf/1-2.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2018. *Policy and Decision-making*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 18 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men17/pdf/1-2.pdf).
- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2020. *Work-life Balance*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 25 September, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men20/pdf/1-4.pdf).

- Gender Equality Bureau Cabinet Office. 2016. *The Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace*. Bureau of Gender Equality, Tokyo : Japan. Diakses pada 13 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/lbp/pdf/promotion_of_woman.pdf).
- Government of Japan. 2015. "Comprehensive National-level Reviews for the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women and Adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action." Diakses pada 20 Januari, 2022
(<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/National-reviews/Japan-en.pdf>).
- Gregory, Raymond F.. 2003. *Women and Workplace Discrimination : Overcoming Barriers to Gender Equality*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Inglehart, Ronald dan Norris Pippa. 2003. *Rising Tide : Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Kantei. 2014. *Revision of Japan Revitalization Strategy: 10 Key Reforms*. Prime Minister's Office, Tokyo : Japan. Diakses pada 19 Januari, 2022
(<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/10challenge02shousaiEN.pdf>).
- Ko, Dorothy, et al, 2003. *Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan*. California: University of California Press.
- Matsui, Kathy. 2007. "Womenomics: Japan's Hidden Asset", *Japan Spotlight (November/December 2007)*: 17-19.
- McClain, Linda C. dan Joanna L. Grossman (Eds.). 2009. *Gender Equality : Dimensions of Women's Equal Citizenship*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Ministry of Foreign Affairs. 2015. Creating "A Society Where Women Shine." Ministry of Foreign Affairs, Tokyo : Japan. Diakses pada 31 Januari, 2022
(https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_acw3/pdf/contry_presentation_japan_07.pdf).
- Nemoto, Kumiko. 2016. *Too Few Women at the Top: The Persistence of Inequality in Japan*. New York: Cornell University Press.

-
- Nolte, Sharon H. and Sally Ann Hastings. 1991. "The Meiji State's Policy Toward Women, 1890-1910" *Recreating Japanese Women, 1600-1945*: 151-174, edited by Gail Lee Bernstein. California : University of California Press.
- Paramore, Kiri. 2016. *Japanese Confucianism: A Cultural History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2013. "Speeches and Statements by the Prime Minister: Address by Prime Minister Shinzo Abe, at The Sixty-Eighth Session of The General Assembly of The United Nations." Diakses pada 6 September, 2021 (http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/26generaldebate_e.html).
- Sakamoto, Tatsuro. 2014. "Ryosai Kenbo: The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives)". *Educational Studies in Japan: International Yearbook*, No. 8, March, 2014: 159-161.
- Steel, Gill (Ed.). 2019. *Beyond the Gender Gap in Japan*. United States: University of Michigan Press.
- Swale, Alistair D. 2009. *The Meiji Restoration: Monarchism, Mass Communication and Conservative Revolution*. United Kingdom : Palgrave Macmillan.
- The Head of the Delegation of Japan. 2016. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Statement by the Head of the Delegation of Japan for the Seventh and Eighth Periodic Reports." Diakses pada 14 Januari, 2022 (<https://www.mofa.go.jp/files/000133481.pdf>).
- Tong, Rosemarie. 2009. *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press.
- Usui, Chikako, et.all. 2003. "Women, Institutions, and Leadership in Japan". *Asian Perspective*, Vol. 27, No. 3:85-123.
- WEF. 2011. "The Global Gender Gap Report 2011." Diakses pada 5 September, 2021 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf).
- WEF. 2012. "The Global Gender Gap Report 2012." Diakses pada 5 September, 2021 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf).
- WEF. 2020. "The Global Gender Gap Report 2020". Diakses pada 5 September, 2021 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf).

